

## Sekilas:

# Program SKALA di Gorontalo Oktober 2024

## Pengantar

Provinsi Gorontalo terletak di bagian utara Pulau Sulawesi, berbatasan dengan Laut Sulawesi di utara dan Teluk Tomini di selatan. Wilayah ini memiliki bentang alam yang beragam mulai dari dataran pesisir hingga pegunungan. Gorontalo resmi menjadi provinsi ke-32 Indonesia pada Desember 2000 berdasarkan UU No. 38/2000. Provinsi ini secara administratif terdiri dari satu kotamadya dan lima kabupaten, yang meliputi 77 kecamatan, 72 kelurahan, dan 657 desa. Kota Gorontalo ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo, sekaligus menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi dan perdagangan terbesar di Kawasan Teluk Tomini. Provinsi ini juga terkenal dengan keanekaragaman hayatinya, bagian dari zona biogeografi Wallacea, rumah bagi sejumlah flora dan fauna unik di dunia, termasuk Hiu Paus Botubarani sebagai destinasi wisata unik di

Gorontalo yang menawarkan interaksi langsung dengan Hiu Paus. Sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi provinsi ini dengan komoditas unggulan seperti jagung, padi, dan kelapa. Namun, tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2024 tercatat sebesar 14,57%, lebih tinggi dari rata-rata nasional, sehingga menjadi tantangan besar yang harus dihadapi.

Program SKALA<sup>1</sup> bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memperkuat partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan, memperkuat pemanfaatan data dan analisis yang handal, meningkatkan kapasitas keuangan daerah, dan kualitas belanja publik. Kantor Program SKALA di Gorontalo mulai beroperasi pada Oktober 2023.



Gambar 1. Data Administratif Utama (Sumber: BPS kecuali disebutkan lain)



Jumlah Penduduk:  
**1.213.000 jiwa**  
(2024)



Luas Wilayah:  
**11.257 km<sup>2</sup>**  
(Kementerian Dalam Negeri,  
2019)



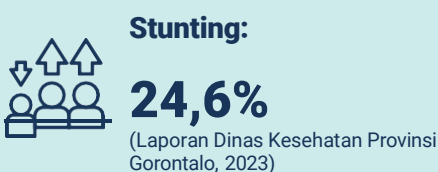
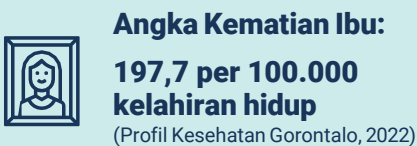
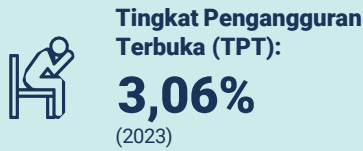
Pusat Pemerintahan  
dan Ibu Kota:  
**Kota Gorontalo**



Kapasitas Keuangan Daerah:  
**Rp13,83 triliun (2024), dengan 40-50%  
berasal dari dana Transfer ke Daerah (TKD)**  
(Badan Keuangan Provinsi Gorontalo dan Antara)

1. Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia yang bertujuan mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

Gambar 2. Data Sosioekonomi Utama  
(Sumber: BPS kecuali disebutkan lain)



## Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Pembangunan ekonomi dan sosial Gorontalo menunjukkan stabilitas yang relatif baik, terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang 38% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh kebijakan strategis yang diterapkan pasca pandemi COVID-19. Meskipun pertanian tetap menjadi yang terkuat, pemerintah daerah sedang memanfaatkan peluang untuk mendiversifikasi ekonomi dengan memperkuat -sektor lain, seperti manufaktur dan konstruksi, dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung perkembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Penyediaan layanan dasar kesehatan dan pendidikan terus diperkuat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, yang berkontribusi pada peningkatan angka harapan hidup serta partisipasi sekolah. Namun, tantangan besar masih dihadapi di wilayah pedesaan, terutama dalam hal akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk membangun ekonomi inklusif dan tangguh yang memberikan manfaat bagi masyarakat, demi tercapainya kemakmuran jangka panjang.



## Dukungan Program SKALA untuk Peningkatan Layanan Dasar yang Inklusif di Gorontalo

Penyediaan layanan dasar adalah tanggung jawab utama pemerintah daerah. Program SKALA memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi untuk meningkatkan penyediaan layanan dasar yang lebih efektif di Gorontalo. Pemerintah provinsi berperan penting dalam memastikan pembentukan Komite Program Provinsi yang ditetapkan dengan surat Keputusan Gubernur, yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah. Program SKALA mengembangkan Rencana Kerja Tahunannya dengan berbasis pada prioritas pemerintah yang tercermin pada dokumen perencanaan dan inisiatif daerah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan dukungan SKALA benar-benar sejalan dan dapat memperkuat perwujudan prioritas pemerintah. SKALA juga mendorong pendekatan kolaborasi pemerintahan (collaborative governance) yang didorong melalui pemahaman bersama, kolaborasi antar mitra pemerintah, serta sinergi yang berkontribusi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola daerah.



## **Mempromosikan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)**

Pemerintah Gorontalo telah menetapkan prioritas untuk perencanaan yang inklusif dengan mengintegrasikan GEDSI ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 2025-2045. Rencana ini akan diperkuat melalui rencana tahunan dan lima tahunan. Dengan dukungan dari Program SKALA, pemerintah daerah membentuk Jaringan Perempuan dan Penyandang Disabilitas untuk melibatkan kelompok rentan dalam proses perencanaan. Untuk mengintegrasikan perspektif GEDSI, konsultasi publik terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 juga telah dilaksanakan. Jaringan ini mencakup berbagai organisasi masyarakat sipil (CSO), seperti Leader Institute, Yayasan Putra Mandiri, Wire G Salampuan, dan Yayasan Ummu Sahidah.

Selain itu, sebagai langkah awal, telah dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Keputusan Gubernur No. 310/2024, serta Tim Teknis PUG yang didasarkan pada Keputusan Gubernur No. 265/2024 pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Program SKALA juga memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah tentang Penyandang Disabilitas (RAD-PD) dan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG).



## **Memanfaatkan Data dan Analitik untuk Perencanaan dan Penyediaan Layanan Dasar yang Lebih Baik**

Pemerintah Provinsi Gorontalo sedang berupaya meningkatkan tata kelola dan penyediaan layanan dasar melalui pemanfaatan Gorontalo Satu Data (GSD), sebuah platform manajemen data yang komprehensif. GSD dirancang untuk mengatasi tantangan terkait data yang terfragmentasi dan tidak konsisten di berbagai tingkat dan lembaga pemerintahan. Dengan hadirnya GSD, data dari berbagai sumber dapat diintegrasikan ke dalam satu sistem, sehingga menyediakan informasi yang akurat, terkini, dan mudah diakses untuk mendukung pengembangan kebijakan yang berbasis bukti.

Data dari Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) juga tengah dianalisis dan diintegrasikan ke dalam

GSD, dengan pembaruan yang dilakukan secara berkala. Bappenas telah menetapkan Gorontalo sebagai wilayah percontohan untuk pembaruan data REGSOSEK. Dalam hal ini, Program SKALA memberikan dukungan melalui pelatihan untuk meningkatkan pemanfaatan data dalam perencanaan daerah. Selain itu, Gubernur Gorontalo juga telah menunjuk Manajer Akun SEPAKAT untuk memastikan bahwa penggunaan data ini berjalan secara efektif.

Sistem informasi desa kini juga sedang diintegrasikan ke dalam GSD guna meningkatkan pengumpulan dan pemanfaatan data di tingkat lokal. Dengan dukungan dari Program SKALA, serta kolaborasi dengan Lembaga Administrasi Negara dan Kementerian Dalam Negeri, kapasitas para Analis Kebijakan di Provinsi Gorontalo terus diperkuat melalui pelatihan yang mendorong pengembangan kebijakan berbasis bukti yang lebih inklusif.



## **Meningkatkan Kapasitas Fiskal**

Pemerintah Provinsi Gorontalo sedang berupaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Fokus utama dari upaya ini adalah meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengumpulan pajak, manajemen keuangan yang lebih efisien, serta pengembangan sektor pariwisata dan pertanian. Selain itu, pemerintah provinsi juga memperbaiki pengelolaan transfer antar pemerintah untuk memastikan dana yang diterima dari pemerintah pusat dialokasikan dan digunakan secara efektif. Salah satu langkah penting dalam inisiatif ini adalah penerapan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, yang mencakup persiapan Peraturan Turunan Kepala Daerah di tingkat kabupaten dan kota.

Dengan dukungan dari Program SKALA yang berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi sedang melakukan studi teknis untuk mengeksplorasi potensi pendapatan dan pembiayaan daerah. Untuk mengatasi tantangan dalam pengumpulan pajak, pemerintah pusat melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk bekerja sama dalam meningkatkan manajemen pajak, terutama untuk pajak kendaraan bermotor, serta melakukan pendaftaran ulang wajib pajak. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan otonomi fiskal pemerintah daerah dan menjamin stabilitas keuangan jangka panjang.



## Peningkatan Kualitas Belanja: Perencanaan Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk meningkatkan kualitas belanja publik yang berfokus pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menetapkan standar minimum penyediaan layanan dasar. Dengan dukungan Program SKALA, Provinsi Gorontalo mendapatkan penguatan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan penyediaan layanan dasar. Hal ini membantu memastikan bahwa semua penduduk, terutama kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas dapat mengakses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan air bersih, sebagai wujud komitmen dalam memastikan kesetaraan dalam penyediaan layanan. Untuk membantu Pemerintah Provinsi

Gorontalo untuk mencapai tujuan ini, Program SKALA memberikan pelatihan khusus kepada Tim Penerapan SPM di tingkat provinsi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang proses SPM serta kemampuan untuk mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan. Tim yang terdiri dari pejabat dan staf teknis, juga membentuk satuan tugas untuk mempercepat implementasi SPM di Gorontalo. Langkah ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan, tetapi juga bertujuan untuk memastikan layanan dasar yang berkualitas dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk, serta mendukung pembangunan Gorontalo yang berkelanjutan.

### Rencana Kerja Program SKALA Tahun 2024-2025

THEME	FOCUS AREAS
<b>Penguatan Partisipasi, Presentasi, dan Pengaruh Kelompok Rentan (GEDSI)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dukungan peningkatan partisipasi, representasi, dan pengaruh kelompok rentan dalam perencanaan serta proses pengambilan keputusan</li></ul>
<b>Penguatan Penyediaan dan Pemanfaatan Data (D&amp;A)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dukungan penguatan kebijakan dan kelembagaan Satu Data Daerah</li><li>• Dukungan penguatan sistem informasi di tingkat desa</li><li>• Dukungan penguatan sistem pengelolaan data dan integrasi antar sistem</li><li>• Dukungan penguatan analisis, pemutakhiran, dan pemanfaatan data</li></ul>
<b>Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah (PFM)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dukungan penguatan pendapatan dan penerimaan daerah</li><li>• Dukungan penguatan pengelolaan transfer ke daerah</li></ul>
<b>Peningkatan Kualitas Belanja Daerah (SPM)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dukungan penguatan pengelolaan implementasi penerapan SPM</li><li>• Dukungan penguatan perencanaan dan Penganggaran daerah untuk penerapan dan pemenuhan layanan dasar yang inklusif</li></ul>
<b>Tata Kelola Program (PPC)</b>	Dukungan tata kelola Program SKALA di Provinsi Gorontalo